

## PPDI Berharap Pemkot Bogor Bangun Panti Disabilitas

**BOGOR (IM)** - Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bogor, Hasan Basri sangat mengapresiasi acara Pekan Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Bogor. Menurutnya acaranya sangat luar biasa, karena memberikan ruang aspirasi untuk masyarakat yang termarjinalkan.

Namun, sampai hari ini di Kota Bogor belum memiliki panti disabilitas, padahal panti atau rehabilitasi bagi disabilitas ini sangat urgen karena banyak disabilitas yang sudah tidak mempunyai orangtua menumpang tidur di sekretariat PPDI.

"Ya, saya mengapresiasi berbagai fasilitas yang sudah diberikan Pemkot Bogor bagi penyandang disabilitas di Kota Bogor," ungkap Hasan kepada wartawan pada Senin (12/12).

"Beberapa yang sudah terimplementasi di antaranya sudah ada sekolah inklusi untuk disabilitas, beberapa armada Biskita dan halte bus sudah ramah disabilitas, pemberian kursi roda dan alat bantu untuk difabel serta

pemberian hadiah di ajang olahraga yang jumlahnya setara dengan non disabilitas," tambah Hasan.

Hasan melanjutkan, meski begitu, masih ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan namun belum terfasilitasi dan menjadi PR agar di tahun depan bisa terealisasi. Di antaranya kebutuhan guru pendamping inklusi bagi disabilitas serta gedung atau kantor rehabilitasi disabilitas.

"Sebab, sampai hari ini di Kota Bogor belum memiliki panti disabilitas. Padahal panti atau rehabilitasi bagi disabilitas ini sangat urgen karena banyak disabilitas yang sudah tidak mempunyai orangtua menumpang tidur di sekretariat PPDI," tutur Hasan.

"Ya, para disabilitas ini kalau orangtuanya sudah meninggal, tidak semua keluarga mau menerima atau merawat penyandang disabilitas. Jadi panti disabilitas sangat diperlukan. Semoga Kota Bogor bisa terus meningkatkan fasilitas bagi disabilitas di Kota Bogor," harap Hasan. ● **jay**

## Pemkab Bogor Dukung Budaya Anti Korupsi



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin pada peringatan HAKORDIA.

**BOGOR (IM)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendukung budaya anti korupsi di lingkungannya. Hal ini sejalan dengan momen puncak Peringatan Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) secara virtual dengan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Ketua KPK RI, di Ruang Rapat I Setda, Cibinong (9/12) kemarin.

Beberapa rangkaian peringatan HAKORDIA, di antaranya webinar dengan para kepala desa terkait penggunaan dana desa, lalu seminar & webinar sebagai upaya pencegahan korupsi mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, serta masih lakukan sosialisasi anti korupsi melalui media luar ruang spanduk, billboard dan banner yang dipasang di dinas dan kecamatan, juga flyer melalui digital videotron dan media sosial.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, pencegahan dan penanganan korupsi di Kabupaten Bogor terus dilakukan secara masif dan menjadi prioritas Peme-

rintah Kabupaten Bogor di semua lini mulai tingkat Kabupaten Bogor, Kecamatan dan Desa.

"Kami selalu mengingatkan agar selalu waspada dan benar-benar melaksanakan program kegiatan dengan benar sesuai dengan aturan," ungkap Iwan Setiawan.

Lanjut Plt. Bupati Bogor, penguatan peran Inspektorat dan pengkoordinasian dengan inspektorat terus ditingkatkan, seperti penyelenggaraan kegiatan, penanganan permasalahan, serta penggunaan keuangan. Termasuk aturan yang harus ditandatangani Plt. Bupati Bogor.

Seluruh dunia memperingati, dan peringatan ini dimaksudkan sebagai gerakan global untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dunia tentang budaya antikorupsi," kata Firli dalam sambutannya.

Turut Hadir mendampingi Plt. Bupati Bogor yakni, Sekda Kabupaten Bogor, Kepala Bappenda, Inspektur, Sekretaris BPKAD, dan Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor. ● **gio**

## Jelang Libur Nataru, Vila di Puncak Masih Sepi Penyewa

**BOGOR (IM)** - Tingkat pemesanan vila di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) masih sepi. Belum terlihat adanya wisatawan yang memesan vila di kawasan tersebut dengan signifikan.

"Dari informasi di lapangan, untuk vila jelang Nataru bookingan belum kelihatan bagus, para pedagang juga masih menunggu. Biasanya malam Natal sepi, malam Tahun Baru ramai," kata Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Puncak, Teguh Mulyana kepada wartawan, Selasa (13/12).

Menurutnya, pemesanan vila baru sekitar 30-40 persen. Itu punya rata-rata vila yang dipesan adalah vila yang dikelola dari Jakarta atau secara profesional.

"Baru sampai 30-40 persen, belum (full booking). Kemarin saya cek di lapangan ada 350 anggota mereka yang ngurus-ngurus vila itu, sudah dicek baru sampai 30 persen, tapi ada sih beberapa yang di-booking sampai hari ini. Kalau yang di-booking itu vila-vila yang dikelolanya dari Jakarta, yang sudah profesional. Kalau vila biasa baru sedikit," ujarnya.

Pemesanan vila untuk malam Tahun Baru biasanya baru akan meningkat pada pekan terakhir Desember. Tetapi, belum dapat dipastikan mengingat wisatawan yang ke Puncak khususnya Jabodetabek belakangan ini kebanyakan pulang pergi dan jarang menginap.

"Tanggal 20 ke atas, baru kelihatan. Kalau dulu 15 hari sebelumnya sudah (ramai) kalau sekarang situasinya seperti apa setelah Covid tapi kalau saya ngobrol di lapangan vila-vila banyak yang kosong. Tapi kalau melihat situasi sekarang wisatawan ke Puncak itu kebanyakan berangkat pagi pulang sore," ujarnya.

Di samping itu, tambah Teguh, terkait harga vila memang biasanya akan mengalami peningkatan pada malam Tahun Baru. Kenalkan harga berkisar 50-100 persen tergantung pemilik atau pengelola vila.

"Kalau malam Tahun Baru biasa (naik), misal malam biasanya Rp1 juta jadi Rp1,5 juta ke atas naik 50-100 persen tergantung. Kadang pengelola vila itu dipaketkan, jadi misal Rp1 juta jadi Rp4 juta tapi harus 2 malam ngingep," pungkasnya. ● **gio**

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



**MENTERI INVESTASI HADIRI PERINGATAN HARI NUSANTARA**  
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (keempat kanan) didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (keempat kiri) dan Bupati Wakatobi Haliana (ketiga kanan) berfoto bersama warga saat menghadiri puncak peringatan Hari Nusantara di Marina Togo Mowondo, Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Selasa (13/12). Puncak peringatan Hari Nusantara tersebut diisi dengan atraksi Sailing Pass KRI, parade 1000 perahu, aksi Terjun Payung, atraksi Flying Pass Sukhoi, serta pagelaran tari kolosal.

## Kejari Bogor Kembalikan Barang Bukti Kasus Korupsi Dana Bencana ke BPBD

Kejari Kabupaten Bogor mengembalikan barang bukti kasus korupsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar barang bukti tersebut bisa dimanfaatkan untuk yang membutuhkan. "Tentunya bantuan kemanusiaan ini akan sangat bermanfaat apabila langsung dimanfaatkan oleh yang membutuhkan," kata Kajari Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo

**BOGOR (IM)** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor mengembalikan sejumlah barang bukti kasus korupsi bantuan penanggulangan bencana alam yang terjadi pada 2017. Barang bukti tersebut dari perlengkapan bayi, pakaian, perlengkapan kesehatan, hingga peralatan penanganan bencana.

Kajari Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo mengatakan bersama jajarannya mengembalikan barang bukti tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk nantinya barang bukti tersebut bisa dimanfaatkan untuk yang membutuhkan.

"Atas langkah-langkah yang dilakukan Kejari dan Pemda khususnya BPBD karena memang bantuan kemanusiaan ini selayaknya untuk bisa diterima untuk korban bencana. Kami menyampaikan terima kasih karena memang saat ini melihat kondisi bencana baik di wilayah Kabupaten Bogor maupun di sekitar, ini kita sedang banyak musibah," kata Agustian di Aula Kejari Kabupaten Bogor,

Selasa (13/12).

"Tentunya bantuan kemanusiaan ini akan sangat bermanfaat apabila langsung dimanfaatkan oleh yang membutuhkan," sambungnya.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bogor, Dodi Wiraatmaja mengatakan kasus tersebut dalam waktu dekat akan siap disidangkan. Ada tiga tersangka dalam kasus tersebut.

"Itu ada Suhendra, Sumardi, dan ditambah mengenai menghalangi penyidikan, yang menyembunyikan. Dikenai pasal obstruction of justice (yang menyembunyikan)," kata Dodi.

Dana penanganan bencana sendiri sebesar Rp 14 miliar yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah. Dana tersebut digunakan untuk 14 kecamatan di Kabupaten Bogor yang terdampak bencana.

"Kemudian keluar anggaran ternyata untuk 3 kecamatan yang kita lakukan penyidikan, anggarannya dipotong semua dan hampir tidak diterima oleh penerima bantuan," ujarnya.

Setelah dihitung oleh tim dari BPBD, ternyata dana

tersebut tidak sampai dengan sebagaimana mestinya. Namun tersangka memanipulasi dana tersebut seolah-olah telah diterima.

"Itu kan setelah diinventarisasi sama TRC, dihitung lah, ternyata setelah dihitung dan digelontorkan uang, uangnya enggak sampai. Tapi dimanipulasi seolah-olah itu sampai ke pihak penerima," pungkask Dodi.

Sebelumnya, Kejari Bogor menetapkan dua orang eks pejabat dan staf di BPBD Kabupaten Bogor berinisial S dan SS, sebagai tersangka dugaan korupsi dana tanggap darurat pada dinas BPBD. Kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 1,7 miliar.

"Melalui proses berdasarkan mekanisme yang ada pada kami, jadi pada hari ini kami telah menetapkan 2 orang, berdasarkan surat

penetapan tersangka nomor 723 kemudian surat penetapan tersangka nomor 724, kami telah menetapkan dua orang tersangka yaitu yang pertama atas nama inisial S, yang kedua atas nama inisial SS," kata Kasie Intel Kejari Bogor Juanda dalam keterangannya, Kamis (28/6).

"Itu perkembangan terbaru terkait dengan penanganan tindak pidana penyidikan dana tanggap darurat pada dinas BPBD tahun anggaran 2017," tambahnya.

Juanda menjelaskan, dugaan tindakan korupsi itu dilakukan pada 2017 ketika S menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bogor. Sementara SS bekerja sebagai staf atau anggota di Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor dengan status pegawai kontrak. ● **gio**

## Pergeseran Tanah, Jalan Penghubung Desa di Sukajaya Bogor Patah

**BOGOR (IM)** - Pergeseran tanah terjadi di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pergeseran tanah menyebabkan jalanan yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Sukajaya patah.

"Hasil pemantauan tanah bergeser membuat jalan betonisasi di Kampung Cikondang penghubung Desa Sipayang dan Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya patah," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko melalui keterangannya, Selasa (13/12).

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (8/12) sekitar pukul 14.00 WIB. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas BPBD.

Petugas BPBD kemudian mendatangi lokasi pada Senin (12/12) kemarin. Petugas melakukan asesmen kebencanaan.

"(Tanah bergeser) dikarenakan tanah yang basah karena dikelilingi oleh persawahan warga dan dampak guyruran hujan," ungkapnya.

Petugas juga melakukan edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat sekitar. Petugas telah memasang portal peringatan jalan rusak di sekitar lokasi.

"Diperkirakan retakan akan melebar dan bertambah, karena kultur tanah yang labil dikelilingi persawahan, ditambah guyruran hujan," ujarnya.

Panjang jalan yang terdampak patah akibat pergeseran itu sepanjang 300 meter. Terdapat 14 patahan dengan kedalaman bervariasi di lokasi kejadian.

Tidak ada rumah warga yang terdampak dalam kejadian itu. Namun dikhawatirkan, apabila retakan meluas, akses warga Kampung Cikondang akan terputus.

"Tidak ada dampak pada permukiman warga, karena akses jalan penghubung jauh dari perkampungan warga Kampung Cikondang.

Apabila retakan jalan makin melebar dan bertambah, maka akses untuk masyarakat Kampung Cikondang akan terputus," pungkask Aris. ● **gio**

SUDAH JADI GARDA TERDEPAN

## Ada Nakes di Tangerang Belum Terima Insentif Penanganan Covid-19

**JAKARTA (IM)** - Puluhan tenaga medis (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang, diduga belum menerima insentif penanganan Covid-19 pada periode 2022. "Di rumah sakit umum Balaraja dan Pakuhaji sudah pada terima 100 persen insentif Covid-19. Kenapa kami belum?" tutur salah seorang nakes RSUD Kabupaten Tangerang yang enggan disebut namanya, Selasa (13/12).

Ia bersama puluhan nakes lainnya mengancam akan membuka identitas jika pihak RSUD Kabupaten Tangerang tidak membayar haknya. Para nakes ini menelan kekecewaan lantaran telah berjuang menjadi garda terdepan dan mengorbankan segala daya upaya untuk merawat pasien Covid-19. "Malahan ada te-

man kami yang mengancam dan akan membeberkan ini semua ke Ombudsman," sambung dia.

Menurut dia, anggaran untuk pembayaran insentif nakes sudah ada. Ia pun menduga ada sesuatu yang ganjil dalam pencairan insentif itu.

Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi (HPI) RSUD Kabupaten Tangerang, Hilwani mengakui RSUD belum menyalurkan insentif nakes Covid-19 periode 2022. Ia menjelaskan, insentif nakes untuk 2022 sedang dalam proses. RSUD berdalih akan menyalurkan insentif itu pada 2023. Dia enggan berspekulasi terkait besaran anggaran yang akan turun tersebut. "Untuk besaran jumlah yang akan dibayarkan saya juga belum dapat informasinya seberapa besar," ujar Hilwani. ● **pp**



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengikuti kegiatan tim surveyor dari Kementerian Kesehatan RI yang melakukan survei akreditasi secara daring guna memperoleh gelar paripurna, di Gedung Gizi Lt. 2 RSUD Cibinong, Senin (12/12).